

Aset DKI Rp 7,9 Triliun Terancam Hilang

Biro hukum dituding gagal mempertahankan aset.

Nur Haryanto

anto@tempo.co.id

JAKARTA – Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk lahan terancam berpindah tangan karena dikuasai pihak lain. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan ada 10-15 lahan yang masih disengketakan di pengadilan. “Nilainya mencapai Rp 7,9 triliun,” kata Heru, saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.

Untuk menyelamatkan aset pemerintah DKI, menurut Heru, semua satuan kerja perangkat daerah telah diminta melakukan pengawasan, terutama terhadap pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga. Ia berpesan agar pemerintah DKI tak kalah lagi di pengadilan. “Kalau kalah, akibatnya semakin banyak aset yang hilang.”

Salah satu penyebab kekalahan Pemerintah Provinsi dalam sengketa, ucap Heru, adalah

kinerja Biro Hukum DKI. Ia mengatakan kecewa terhadap kinerja Biro Hukum DKI yang dianggap buruk dalam mempertahankan aset. “Mereka itu kerja apa sehingga sering kalah di pengadilan?”

Jika Biro Hukum tak dapat mempertahankan aset Ibu Kota, Heru mengatakan BPKAD akan mengambil alih pengurusan lahan-lahan bermasalah hingga selesai. Pihaknya akan bekerja sama dengan setiap pejabat, dari lurah, camat, hingga wali kota, untuk mengecek kembali aset lahan dengan catatan yang dimiliki BPKAD.

Aset-aset bermasalah



TEMPO/SUBEKTI

di DKI tersebut membuat Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat wajar dengan pengecualian bagi laporan keuangan DKI 2014. BPK mengatakan nilai aset DKI berupa lahan yang masih dalam sengketa mencapai Rp 7,9 triliun. Aset ini berupa lahan dengan luas total 1.538.972 meter persegi.

Dari total luas lahan itu, ada 11 aset tanah seluas 67.239 meter persegi dengan nilai Rp 259 miliar yang sudah melayang dari tangan pemerintah DKI. Lahan itu antara lain lapangan sepak bola di Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan nilai Rp 36,6 miliar; tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Puri Kembangan Raya, Jakarta Barat (Rp 121,6 miliar); dan tanah di Jalan Bambu Kuning, Bambu Apus, Jakarta Timur (Rp 13,6 miliar).

Gubernur DKI Jakarta **Basuki Tjahaja Purnama** mengatakan hasil temuan BPK harus ditelisik lebih dalam. “Temuan tersebut apakah dosa lama dari peninggalan pemerintahan sebelumnya, atau dosa baru dari pemerintahan saat ini?” ujar

Basuki.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga, mengatakan persoalan hilangnya aset DKI Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak lama. “Mungkin sejak 30-40 tahun yang lalu sudah terjadi,” kata dia.

Bahkan, menurut Nirwono, bisa jadi jumlah aset tanah DKI yang hilang lebih dari itu. Hal ini terjadi lantaran tak ada perhatian dari pemerintah DKI Jakarta terhadap aset yang dimilikinya. “Baru tiga tahun belakangan DKI mulai mendata asetnya,” kata dia.

Nirwono mencontohkan kasus sengketa Taman BMW, yang akan dikorbankan untuk proyek pembangunan stadion guna menyambut Asian Games 2018. Sejak 1994, tanah itu merupakan milik pemerintah DKI yang diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Namun ternyata ada pihak lain yang memiliki sertifikat tanah di lokasi yang sama. Menurut dia, hal itu bisa terjadi karena DKI tak mampu menjaga asetnya. “Selain itu, banyak pihak lain yang bermain,” ujarnya.

● YOLANDA RYAN ARMINDYA | GANGSAR PARIKESIT | NINIS CHAIRUNNISA